

renstra

2017 - 2022



RENCANA STRATEGIS

DINAS PANGAN PROV. GORONTALO



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

2017

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Kedua dokumen acuan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017 – 2022, yang diarahkan untuk mewujudkan *Visidan Misi Provinsi Gorontalo tahun 2017- 2022*".

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan Rencana Strategis serta kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo melalui target rencana Strategis dan pencapaian kinerja ini, semoga dapat dengan mudah dan sangat memahami untuk lebih meningkatkan kinerja serta kerjasama semua staf yang dibina selama ini.

Olehnya itu, demi terwujudnya apa yang dicita-citakan mudah-mudahan dengan Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat dan senantiasa berupaya mengurangi hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme penerapan sistem Anggaran tentang rencana kerja yang telah dijabarkan selama ini sesuai dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Semoga Rencana Strategis Bidang Ketahanan Pangan, dapat memberikan masukan bagi penyusunan RENJA Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo dan RENJA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota.

Gorontalo, Desember 2017

Kepala Dinas,



Ir. H. YUSUF GIASI, M.Sc
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600928 199003 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Gambaran Umum Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.....	8
2.2 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo	8
2.3 Sumber Daya Dinas Pangan Provinsi Gorontalo	8
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan.....	28
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31
3.2. Telaahan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2022.....	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD	38
3.4 Telaahan Rencana Kerja Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5 Penentuan Isu-IsuStrategis.....	45
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas pangan	48
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan.....	50
BAB VI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	
	54
BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO.....	
	58
BAB VI. PENUTUP	
7.1 Pedoman.....	60
7.2 Kaidah Pelaksanaan... ..	60
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hakazasi manusia, jugamerupakan pilarbagieksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu,seluruh komponen bangsabaik Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta, mulai dari pusat, provinsi dankabupaten/kota, sepakat untukbersama-sama membangun ketahanan pangannasionalmaupun daerah.Dalamsistempemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelakuutamapembangunan panganmulaidariproduksi,penyediaan, distribusidankonsumsi adalah masyarakat, sedangkanpemerintahlebih berperan sebagai inisiator,fasilitator, sertaregulator, agarkegiatan masyarakat yangmemanfaatkan sumberdayadaerahdapat berjalanlancar,efisien,berkeadilan dan bertanggungjawab.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007 – 2025 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Tujuan pembangunan ketahananpangan adalah untukmenjamin ketersediaan dan konsumsi panganseluruh penduduk yang cukup, aman,bermutu,danbergiziseimbang,baik padatingkatnasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, Keluarga hingga perorangan. Ketahananpanganharusdiwujudkansecarameratadi seluruhwilayah sepanjang waktu yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Mengingat panganjuga merupakankomoditasekonomi,makadalampembangunannya dikaitkandenganpeluangpasardan peningkatandayasaingproduk,dengan memanfaatkankeunggulankomparatifdankompetitifdan memanfaatkan

teknologispesifiklokasi. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, sehingga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai bagian integral dari Pemerintah Pusat yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif, dalam berbagai hal untuk melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah kekurangan pangan dan kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan di dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit (1996)) dan ditegaskan kembali dalam World Food Summit: five years later (WFS:5YL) 2001, serta deklarasi Millennium Development Goals (MDGs) 200 yang isinya antara lain menyepakati mengurangi angka kemiskinan ekstrem/penduduk lapar dan kerawanan pangan di dunia.

Berdasarkan kerangka berfikir dan komitmen tersebut, serta dengan tetap berpedoman pada RPJPD Pemerintah Provinsi Gorontalo 2007-2025, Dinas Pangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya berkerjasama secara sinergis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan membebaskan masyarakat dari kelaparan dan kerawanan pangan. Perwujudan program pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo tidak lepas dari pengembangan kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber pangan lokal untuk menopang terwujudnya kedaulatan pangan, untuk terpenuhinya pangan dengan hidup sehat dan produktif bagi setiap rumah tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, dan menindaklanjuti penyampaian visi, misi dan program Gubernur Gorontalo 2017-2022 yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022, maka disusunlah Renstra-SKPD Dinas Pangan tahun 2017-2022 yang merupakan satu bagian yang

utuh dari kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dapat dijadikan sebagai acuan dan arahan untuk mengembangkan dan menjalankan fungsi dan peranannya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Renstra ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada merupakan dokumen perencanaan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Rencana Strategi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo serta berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Pangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan periode 2017-2022 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor dan subsektor terkait. Mengingat peran dan fungsi renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan.

Renstra ini menjadi komitmen Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Provinsi Gorontalo yaitu **“Gorontalo yang Maju Unggul dan Mandiri”**.

1.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 adalah:

1. Deklarasi World Food Summit tahun 1996 dan tahun 2001
2. Sustainable Development Goals Tahun 2015
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 jo tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 23 Tahun 2014;
 13. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

22. Keputusan Presiden Nomor 46/P/Tahun 2017 Tanggal 10 April 2017, No 50 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 dan no. 52P-55P Tahun 2017 tentang pelantikan Gubernur Gorontalo di tetapkan di Jakarta pada Tanggal 10 Mei 2017.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2005- 2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;
27. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 213/28/VI/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 terutama yang terkait dengan urusan pangan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo adalah untuk menetapkan strategi dan arah pembangunan ketahanan pangan Provinsi Gorontalo serta sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, RKA/DPA dan sebagai penutun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada Bab II diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 Pada Bab ini dikaitkan dengan telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2017-2022 dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada Bab ini diuraikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini diuraikan Isi Rancangan Renstra yang mengacu pada RPJMD 2017-2022.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Pada bagian ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan renstra SKPD Dinas Pangan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1.2. Gambaran Kondisi Umum Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

Dinas Pangan Provinsi Gorontalo adalah lembaga teknis urusan wajib non pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pangan. Pembentukan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 74 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perubahan dari Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung menjadi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas- Pangan Provinsi Gorontalo.

2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

a. Tugas Pokok

Tugas Dinas Pangan Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan, berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja DinasPangan Provinsi Gorontalo.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, Dinas Pangan Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang Pangan.
- b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan

Pemerintah Daerah bidang pangan meliputi : kesekretariatan, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan.

c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 dituangkan pada uraian tugas Sekretariat dan tiga Bidang sebagai berikut :

1. **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
2. **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.
3. **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan distribusi dan cadangan pangan.
4. **Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

c. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

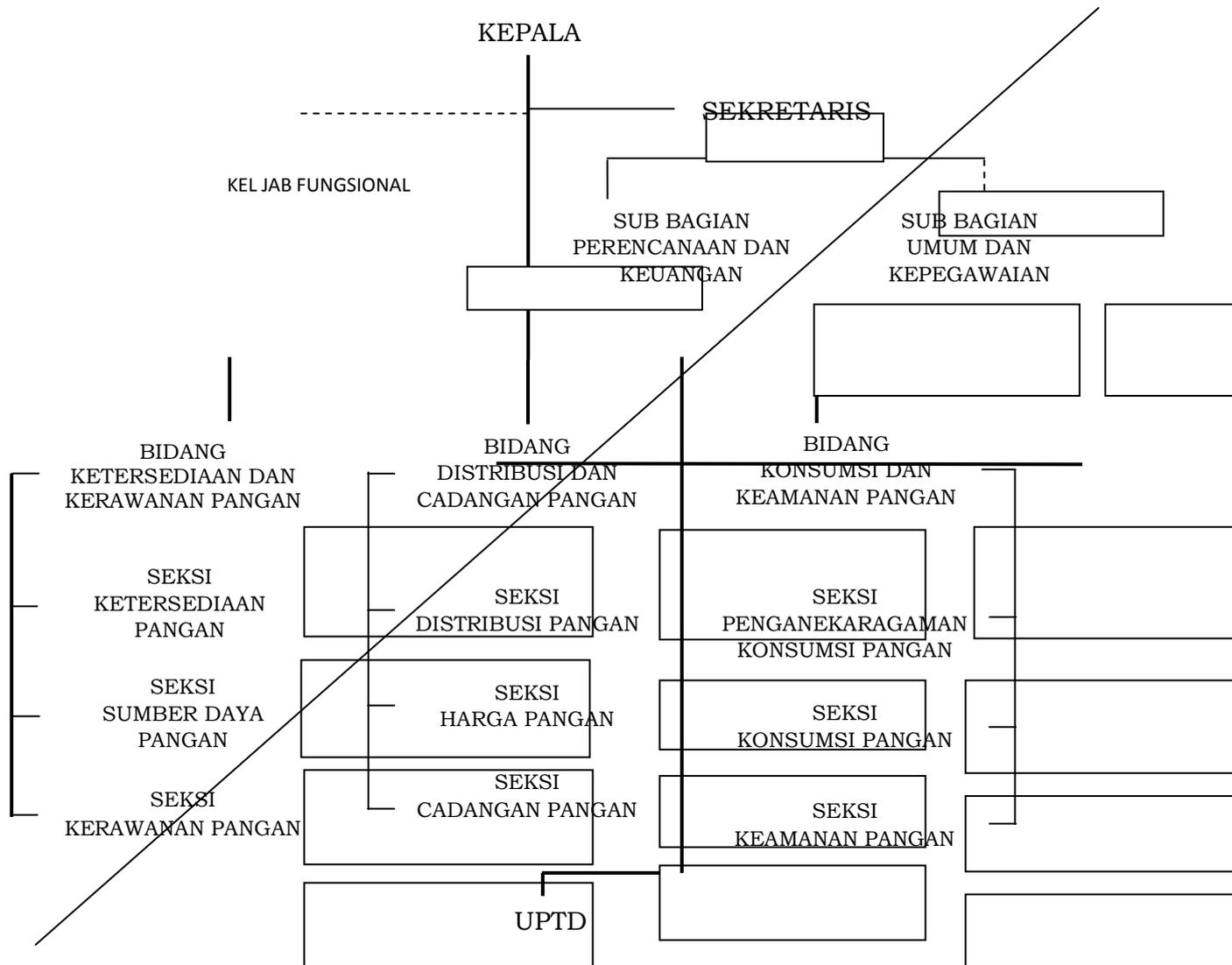
Susunan organisasi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pangan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :

- d. Seksi Distribusi Pangan
 - e. Seksi Harga Pangan
 - f. Seksi Cadangan Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
- a. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - b. Seksi Konsumsi Pangan
 - c. Seksi Keamanan Pangan
5. UPT Dinas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

3. Sumber Daya Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

Pemerintahan yang baik (*good Governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Pemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengwasan yang efektif.

A. Sumber Daya Aparatur

Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggara pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan mendatang. Sumber daya aparatur pemerintah bukan saja menempati posisi yang strategis yang bukan saja mewarnai melaiknan juga menentukan arah kemana akan dibawa pembangunan suatu daerah.

Jumlah SDM Aparatur Dinas Pangan Provinsi Gorontalo sebanyak 77orang yang terdiri atas seorang pimpinan, seorang sekretaris, 3 orang kepala bidang, 11 orang kepala seksi, dan 61 orang staf (36 orang berstatus PNS dan 25 orang berstatus honorer)

Berdasarkan Pangkat/Golongan, Pegawai Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Terdiri dari :

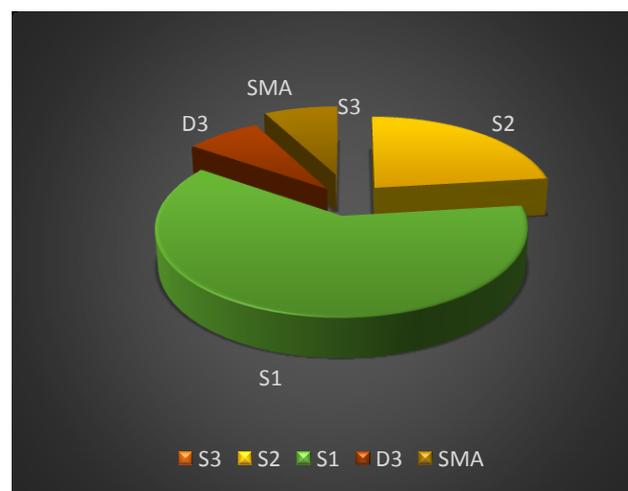
- Pegawai Golongan IV sebanyak 8 orang atau 15.38% dari jumlah seluruh pegawai Dinas Pangan
- Pegawai Golongan III sebanyak 36 orang atau 69.24% dari jumlah pegawai Dinas Pangan
- Pegawai Golongan II sebanyak 8 orang atau 15.38 % dari jumlah pegawai Dinas Pangan

Pegawai Dinas Pangan Provinsi Gorontalo berdasarkan Eselonisasi bisa dilihat pada tabel berikut ini :

	PRIA	WANITA
ESELIN II	1 ORANG	-
ESELON III	1 ORANG	3 ORANG
ESELON IV	5 ORANG	6 ORANG
PEJABAT FUNGSIONAL	-	-
STAF	15 ORANG	21 ORANG
PTT	18 ORANG	9 ORANG
JUMLAH	40 ORANG	39 ORANG

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Eselonisasi

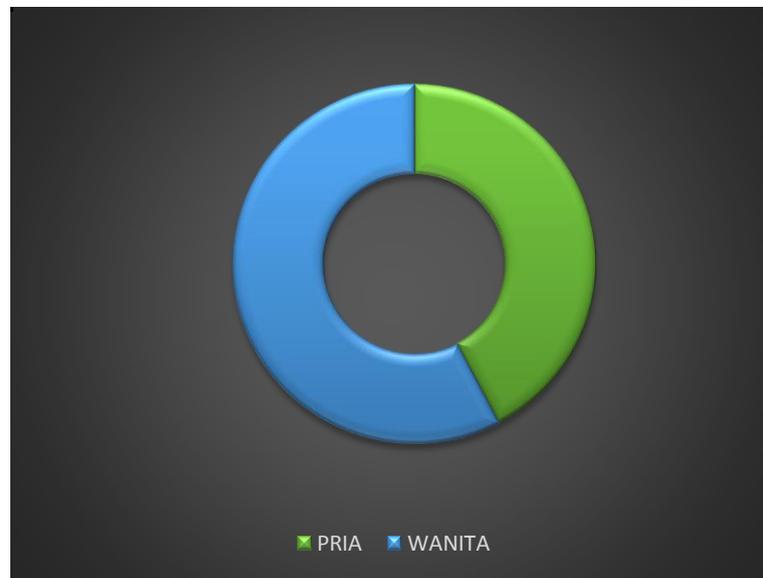
Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, pegawai Dinas Pangan Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 (sarjana) 61.53%, kemudian S2 23.07% D3 7.7% dan SMA 7.7%. Dari komposisi ini dapat dilihat pada gambar 2.2 bahwa pegawai Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang berpendidikan Sarjana cukup banyak, hal ini dikarenakan banyak pegawai yang berpendidikan D3 dan SMA telah meneruskan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi.



Gambar 2.2 komposisi pegawai Dinas Pangan Provinsi Gorontalo berdsarkan tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017 jumlah pegawai pria yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 22orang atau 42.30% dan pegawai wanita

sebanyak 30 orang atau 57.70%. Artinya persentase antara pria dan wanita sudah proporsional di Dinas Pangan Provinsi Gorontalo sebagaimana pada gambar 2.3. Keterwakilan wanita Dinas Pangan Provinsi Gorontalo sudah terpenuhi dalam pengarusutamaan gender yang mempersyaratkan 30% keterwakilan perempuan dalam pekerjaan suatu instansi.



Gambar 2.3 Komposisi pegawai pria dan wanita Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

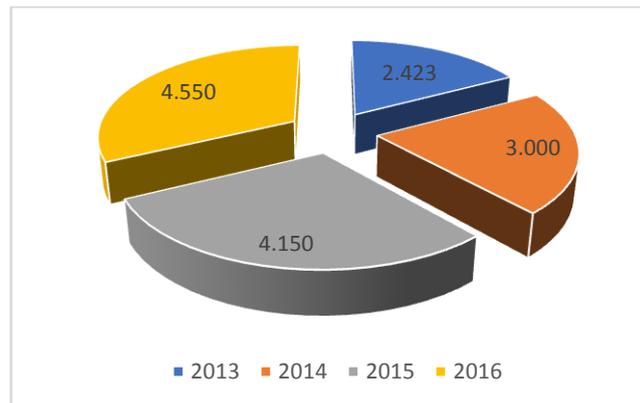
Berdasarkan Analisis Jabatan (ANJAB) yang disusun oleh Bagian Kepegawaian, jumlah pegawai Dinas Pangan Provinsi Gorontalo sudah mencukupi kebutuhan namun faktanya Sumber Daya Manusia yang dimiliki belum optimal melaksanakan tugasnya. Beberapa masalah antara lain :

- Beberapa tugas teknis seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan TUPOKSI namun merangkap tugas lain.
- Pendistribusian pekerjaan belum memperhatikan pendidikan Pegawai yang dimiliki.

B. Sumber Daya Finansial

Dari sisi Anggaran, Dinas Pangan Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2016, struktur belanjanya bervariasi dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Pada tahun 2013, Dinas Pangan memperoleh anggaran 2,423 Milyar Rupiah, tahun 2014 naik menjadi 3 Milyar Rupiah.

Sedangkan pada tahun 2015 memperoleh anggaran 4,150 Milyar Rupiah, dan pada tahun 2016 naik sebesar 9.6% menjadi 4,550 Milyar Rupiah.



Gambar 2.4 Komposisi Anggaran Dinas Pangan Prov. Gorontalo

Dalam lima tahun terakhir, struktur belanja Dinas Pangan masih didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa. Lebih dari setengah total Belanja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa. Untuk proporsi Belanja Modal cenderung menurun dalam pada tahun terakhir.



Gambar. 2.5 Komposisi Belanja Dinas Pangan Prov. Gorontalo

C. Sumber Daya Aset

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasana yang telah dimiliki oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Provinsi

Gorontalo maupun APBN meliputi gedung kantor, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, sarana informasi dan sebagainya.

a. **Aset Lancar**

Tabel 2.2 Jumlah Aset Lancar

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016
1.1.1	Kas	0,00
1.1.4	Piutang lain-lain	11,638,356.16
1.1.5	Persediaan	725,000,00
Jumlah		12,363,356.16

Jumlah Aset Lancar Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2016 adalah **12,363,356.16** yang terdiri dari Piutang Lain-lain yang merupakan biaya sewa dibayar dimuka Sewa KDO-S dan persediaan barang habis pakai.

b. **Aset Tetap**

1. **Tanah**

Tabel 2.3 Aset Tanah

Uraian	Anggaran 2016	Anggaran 2015
Akun Terdiri dari :		
Saldo Awal	783.315.000	783.315.000
Penambahan	-	-
Pengurangan	-	-
Saldo Akhir	783.315.000	783.315.000

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2016 Rp. **783.315.000** atau dibanding dengan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp **783.315.000** menunjukkan tidak adanya perubahan.

2. Peralatan dan Mesin

Tabel 2.4 Aset Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2016	Anggaran 2015
Akun Terdiri dari :		
Saldo Awal	2.946.228.297	2.502.253.297
Penambahan	229.420.000	443.975.000
Pengurangan	-	-
Saldo Akhir	3.175.648.297	2.946.228.297

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016 Rp. **3.175.648.297** atau dibanding dengan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp **2.946.228.297** menunjukkan adanya perubahan yaitu adanya Penambahan Aset sebesar Rp. **229.420.000**.

3. Gedung dan Bangunan

Tabel 2.5 Aset Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2016	Anggaran 2015
Akun Terdiri dari :		
Saldo Awal	14.661.000	14.661.000
Penambahan	20.000.000	20.000.000
Pengurangan	-	-
Saldo Akhir	34.661.000	34.661.000

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2016 Rp. **34.661.000** atau dibanding dengan realisasi Tahun 2015 sebesar **34.661.000** menunjukkan tidak adanya perubahan.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 2.6 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Anggaran 2016	Anggaran 2015
Akun Terdiri dari :		
Saldo Awal	491.179.000	491.179.000
Penambahan	101.416.000	101.416.000
Pengurangan	-	-
Saldo Akhir	592.595.000	592.595.000

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2016 Rp. **592.595.000** atau dibanding dengan realisasi Tahun 2015 sebesar **592.595.000** menunjukkan tidak adanya perubahan.

5. Aset Tetap Lainnya

Tabel 2.7 Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2016	Anggaran 2015
Akun Terdiri dari :		
Saldo Awal	30.541.075	30.541.075
Penambahan	-	-
Pengurangan	-	-
Saldo Akhir	30.541.075	30.541.075

Realisasi Belanja Aset tetap lainnya 2016 Rp. **30.541.075** atau dibanding dengan realisasi Tahun 2015 sebesar **30.541.075** menunjukkan tidak adanya perubahan. Jumlah Aset Tetap Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2016 adalah Rp.

4.616.760.372 Tetapi adanya Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 1.986.014.178. Jadi, Aset Tetap Dinas Pangan Prov. Gorontalo Tahun 2016 Rp. 2.630.746.194.

Aset Lainnya

Biaya Perolehan Aset lain-lain Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo Tahun 2016 adalah Rp. **182.629.950** yaitu terdiri dari aset tak berwujud Rp. 4.700.000 dan aset lain-lain Rp. 177.929.950.

4. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra SKPD periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya seperti *Millenium Development Goals* (MDGs), Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi, Pengarusutamaan Gender (PUG) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

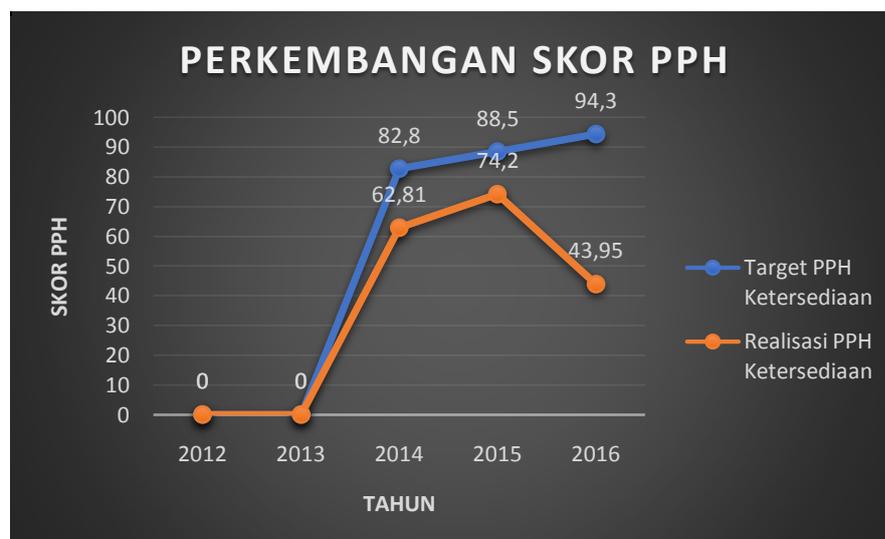
Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah : 1) **urusan wajib** terdiri dari urusan ketahanan pangan dan 2) **urusan pilihan** terdiri dari urusan pertanian. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Gorontalo termasuk pemenuhan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN nomor 65/permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Dinas Pangan terbagi atas 3 (tiga) jenis pelayanan Dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2. Distribusi dan Cadangan Pangan
3. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Dinas Pangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2012 s.d 2017 memiliki tujuan sebagai berikut : 1) menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup beragam, aman dan sehat, 2) terjaminnya sistem distribusi pangan yang baik, untuk menjamin stabilitas harga dan cadangan pangan pemerintah dan

masyarakat, 3) meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bermutu dan aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal, dan 4) Meningkatkan jumlah dan ragam informasi inovasi teknologi jagung yang disajikan berbasis teknologi informasi.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pangan adalah meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat dengan indikator kinerja skor PPH (Pola Pangan Harapan). Capaian skor PPH yang meningkat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar 2.3 capaian tahun 2014 sebesar 62,8. Realisasi pada tahun 2015 meningkat 18.11 % dari tahun sebelumnya menjadi 74.2. dan pada tahun 2016 mencapai 43.95 (per Agustus 2017). Angka tersebut merupakan angka sementara karena masih menunggu data tetap dari lintas sektor. Namun presentasi kenaikan ini masih jauh dari target, hal ini dapat dilihat pada grafik menunjukkan bahwa capaian tahun 2014 selisih/gap sebesar 24.14% dari target PPH sebesar 82.8. Sementara, pada tahun 2015 gapnya 16.15 % dari target PPH sebesar 88.5. Tidak tercapainya skor PPH ketersediaan pada tahun 2014 dan 2015 yakni kurangnya ketersediaan pangan yang diakibatkan musim kemarau yang panjang. Selain itu meskipun pangan tersedia, namun daya beli masyarakat sangat rendah diakibatkan gagal panen di tingkat petani.

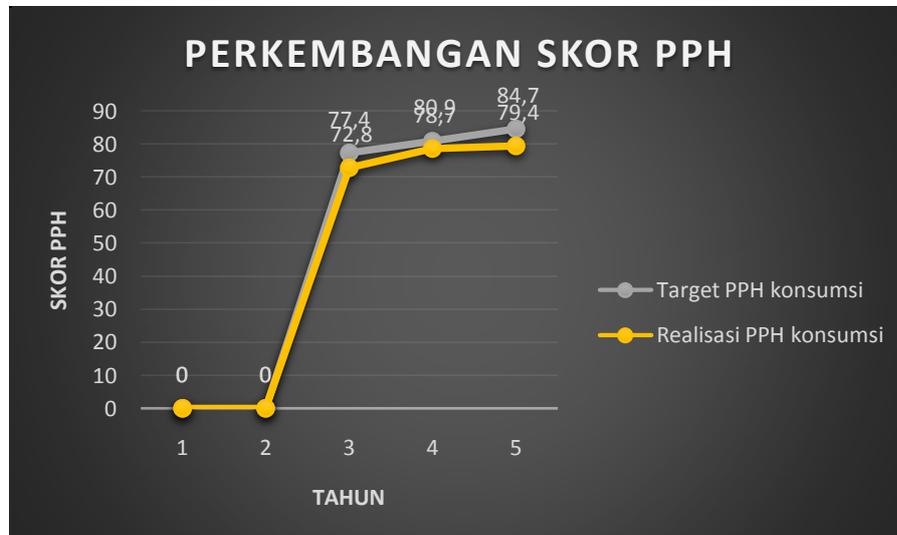


Sumber : diolah dari Dinas Pangan Prov. Gorontalo

Gambar 2.6 Perkembangan Skor PPH ketersediaan tahun 2012-2016

Sementara untuk skor konsumsi pada tahun 2014 mencapai 72, 8 sedangkan pada tahun 2015 naik dari tahun 2014 sebesar 8.1 % menjadi

78.7. sedangkan capaian pada tahun 2016 mencapai 79.4 hanya naik sebesar 0.89 % dari tahun sebelumnya. Meningkatnya skor PPH konsumsi disebabkan pola konsumsi pangan masyarakat Gorontalo sudah semakin beragam. Hal ini disebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari gambar 2.4 di berikut ini :



Sumber : diolah dari Dinas Pangan Prov. Gorontalo

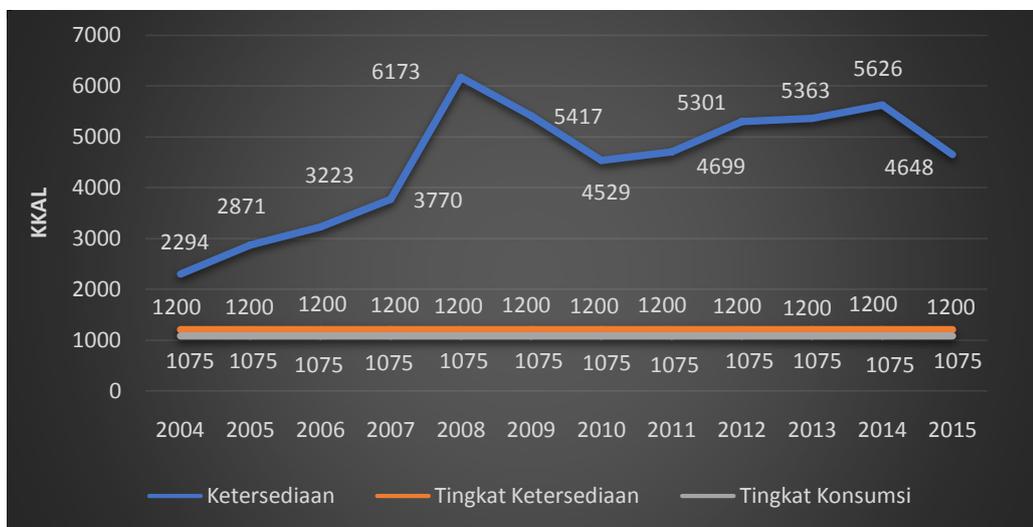
Gambar 2.3 Perkembangan Skor PPH ketersediaan tahun 2012-2016

Akan tetapi dari segi pencapaian kinerja, meskipun pola konsumsi masyarakat Gorontalo yang semakin beragam, tetapi masih belum seimbang sebab skor PPH masih dibawah dari PPh konsumsi yang ditargetkan. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan pangan yang diakibatkan musim kemarau yang panjang. Selain itu konsumsi energi dari pangan hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan serta kacang-kacangan masih rendah dibawah norma PPH, masing-masing antara 8-12 % dan 4-5 %. Sementara itu konsumsi dari kelompok padi-padian (beras, dan terigu) masih dominan baik di kota maupun di desa. Pangsa konsumsi energi seharusnya dari kelompok pangan padi-padian hanya 50 persen, namun kenyataannya masih sebesar 60,7 persen di kota dan 63,9 persen di desa. Sedangkan kontribusi energi dari umbi-umbian masih sekitar setengahnya dari yang dianjurkan.

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan didukung oleh tiga sub sistem penyusunnya yakni sisi ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Intervensi kebijakan dan program Ketahanan Pangan selama

periode 2012-2017 telah menaikkan tingkat ketersediaan energy (kalori/kapita/hari) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5 walaupun fluktuatif. Tetapi ketersediaan protein (gr/hari) dan lemak (gr/kapita/hari) cenderung menurun seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.

P
a
d
i
-
P
a
d
i
a
n

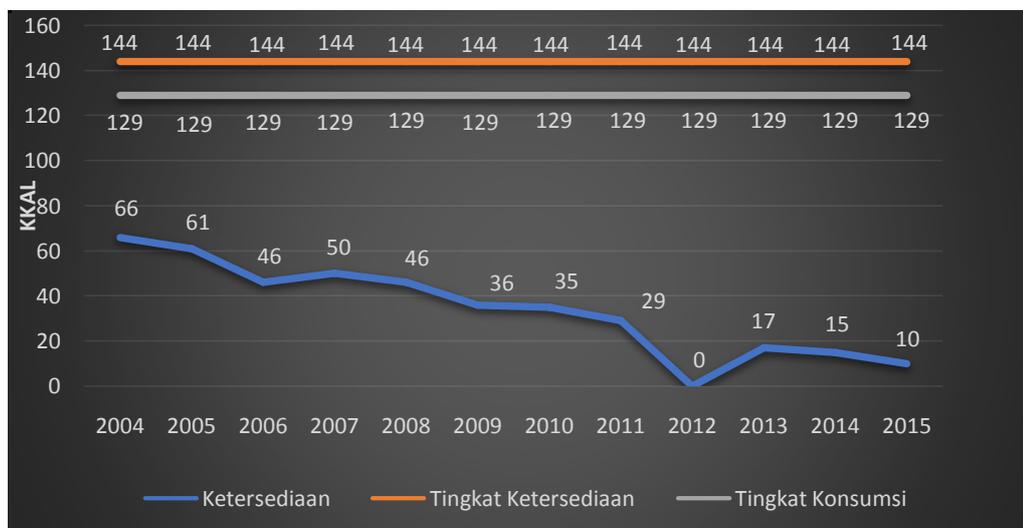


Sumber : diolah dari Dinas Pangan Prov. Gorontalo

Gambar 2.5 Perkembangan ketersediaan padi-padian tahun 2012-2016

Pada komoditi padi-padian tergambar bahwa ketersediaan pangan mengalami surplus meskipun produksinya berfluktuatif setiap tahunnya. Hal ini

i
d
i
s
e
b
a
b
k
a
n
k
a



rena tingkat ketersediaan maupun tingkat konsumsi pangan asal padi, selalu terpenuhi oleh komoditas padi.

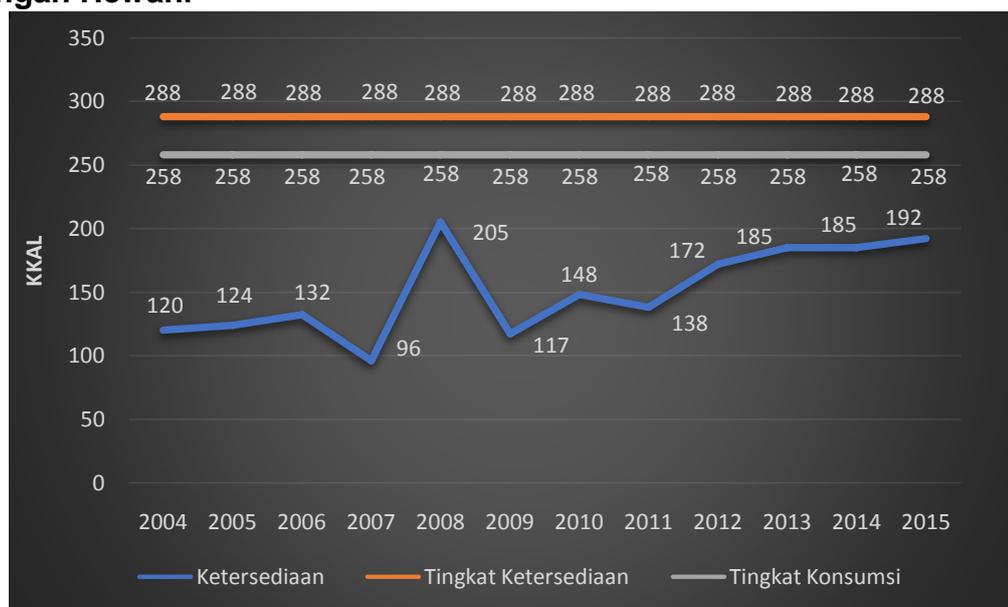
Umbi-umbian

Sumber : diolah dari Dinas Pangan Prov. Gorontalo

Gambar 2.6 Perkembangan ketersediaan umbi-umbian tahun 2012-2016

Dari gambar 2.6 menunjukkan ketersediaan pangan asal umbi-umbian tidak mampu memenuhi kebutuhan baik tingkat ketersediaan maupun tingkat konsumsi pangan masyarakat Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh produksi umbi-umbian di Gorontalo masih kurang, karena luas tanam untuk komoditi pangan asal umbi-umbian masih sangat sempit, hanya terbatas pada konsumsi rumah tangga dan sisanya untuk dijual.

Pangan Hewani



Sumber : diolah dari Dinas Pangan Prov. Gorontalo

Gambar 2.7 Perkembangan ketersediaan Protein tahun 2012-2016

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa ketersediaan protein dari hewani belum dapat memenuhi tingkat ketersediaan maupun tingkat konsumsi protein masyarakat Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh produksi pangan hewani tidak mengalami peningkatan produksi yang signifikan. Penyebab utama berfluktuasinya ketersediaan tersebut, antara lain disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya secara arif dan adanya gangguan iklim, dan juga di pengaruhi oleh jumlah permintaan terhadap pangan yang merupakan dampak dari peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan penurunan ketersediaan lemak, antara lain disebabkan oleh produksi pangan hewani

tidak mengalami peningkatan produksi yang cukup besar, serta penambahan penduduk tiap tahun semakin bertambah.

Dari sisi konsumsi, selain pelaksanaan Gerakan Pola Konsumsi Pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), pencapaian target skor PPH juga didukung melalui usaha pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan, dan peningkatan sosialisasi maupun promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal.

Capaian tahun 2016, angka konsumsi energi di Provinsi Gorontalo adalah 2.529.9 kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein 69,2 gram/kapita/hari, maka tingkat konsumsi energi maupun protein yang sudah terpenuhi. Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal terutama umbi-umbian menjadi alternatif terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit degeneratif seperti diabetes, kanker dan serangan jantung karena umbi-umbian dapat dikembangkan menjadi makanan fungsional yang memiliki indeks glikemik rendah, kaya kandungan prebiotik dan antioksidan.

Selain mutu/kualitas konsumsi, aspek keamanan pangan sangat penting belakangan ini. Dengan terbukanya pasar terhadap masuknya produk pangan dari luar daerah maupun dari luar negeri, masalah dan tantangan keamanan pangan semakin kompleks. Tim jejaring keamanan pangan daerah telah berperan aktif di Gorontalo dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar, sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dari berbagai cemaran fisik, biologis, kimiawi maupun mikrobiologis.

Untuk distribusi pangan telah tertangani dengan baik. Sedangkan untuk informasi pasokan harga pada tahun 2016 mencapai 94% dengan koefisien varian harga beras dibawah 5%. Untuk perkembangan gapoktan LDPM ada 43 gapoktan dan 11 dalam keadaan vakum, sedangkan untuk lumbung pangan dari total 59 lumbung pada tahun 2016 ada 7 lumbung yang bermasalah. Sedangkan kendala dilapangan yang selama ini terjadi yakni pelaporan Pendamping dan Tim Teknis Kabupaten P-LDPM dan Lumbung Pangan yang belum optimal dan belum rutin dilaksanakan, Pengiriman Data

Panel Data Harga Pangan di hari libur terkadang macet atau tidak dilakukan dan adanya data yang konstan dalam beberapa minggu, sehingga perlu keseriusan dari Enumerator dalam mengambil informasi harga pangan. Selanjutnya Validasi/intervensi data harga penting dilakukan saat terjadi gejolak khususnya untuk komoditi bawang, *rica* (cabe rawit), tomat (BARITO).

Sementara itu akses pangan diberikan fasilitasi kepada gapoktan di daerah rawan pangan dengan tujuan mendekatkan pangan kepada masyarakat, sehingga tersedia pangan yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan. Gapoktan di daerah sentra produksi pangan juga difasilitasi agar dapat menampung dan mengelola hasil panen masyarakat setempat sehingga harga pangan terjaga, tidak merugikan petani saat panen raya dan tidak memberatkan konsumen saat musim paceklik. Sebab harga pangan pokok yang berpengaruh terhadap inflasi juga dipantau secara rutin dan bila perlu dilakukan pengendalian operasi pasar oleh Dinas Pangan bekerjasama dengan Diskumperindag dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo serta stakeholder lainnya. Harga pangan pokok di Gorontalo selama tahun 2016 relatif terkendali, hal ini sangat didukung oleh keberadaan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Keberhasilan pencapaian ketiga sub sistem ketahanan pangan tersebut secara sinergis telah mendukung upaya penurunan kemiskinan dan kerawanan pangan di Gorontalo.

Tabel 2...
Matriks Kinerja Pelayanan SKPD

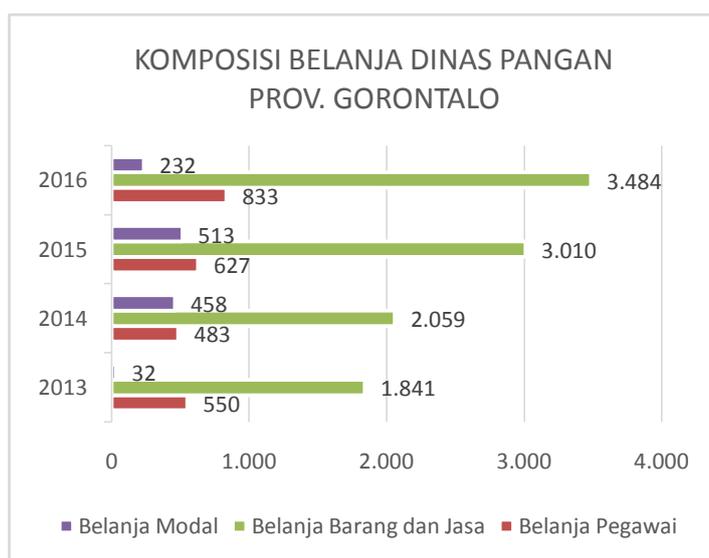
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan			82.8	88.5	94.3			62.81	74.2	43.9			0.76	0.84	0.47
2	Tersedianya Dokumen analisis dan peta daerah rawan pangan			3 dok	3 dok	3 dok			3 dok	3 dok	3 dok			1	1	1
3	Terfasilitasinya penanganan daerah rawan pangan			700 kk	700 kk	700 kk			700 KK	1000 kk	700 kk			1	1.4	1
4	Tersedianya Cadangan pangan di tingkat masyarakat			5 ton	5 ton	10 ton			10	20	30			2	4	3
5	Meningkatnya Ketersediaan informasi pasokan dan harga pangan didaerah			80.7%	87%	94%			80.7%	87%	94%			1	1	1

6	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi			77.4	80.9	84.7			77.4	80.9	84.7			1	1	1
7	Tersedianya dokumen hasil uji pangan segar			1 dok	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok			1	1	1
8	Tersedianya Paket inovasi Teknologi hasil pengkajian dan Pengembangan jagung			2 Paket Teknologi	2 Paket Teknologi	2 Paket Teknologi			2 Paket Teknologi	2 Paket Teknologi				1	1	0
9	Terdiseminasinya paket informasi jagung			3 Paket informasi	3 Paket informasi	3 Paket informasi			3 Paket informasi	3 Paket informasi				1	1	0

Tabel 2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung		2,423	3,000	4,150	4,550		2,364	2,836	3,953	4,272		97.6	94.5	95.3	93.9	3,531	3,356
Belanja Tidak Langsung		3,486	4,016	4,144	4,008		3,406	3,894	4,052	4,008		97.7	97.0	97.8	100	3,914	3,840
Belanja Pegawai		550	483	627	833		537	435	591	772		97.5	90.0	94.3	92.6	623	584
Belanja Barang dan Jasa		1,841	2,059	3,010	3,484		1,796	1,946	2,862	3,271		97.5	94.5	95.1	93.9	2,599	2,469
Belanja Modal		32	458	513	232		32	455	501	229		99.7	99.3	97.6	98.8	309	304
Belanja Lainnya																	
Program....																	

Data anggaran dan realisasi anggaran yang terdapat pada tabel 2. Menunjukkan bahwa kinerja anggaran program utama pembangunan ketahanan pangan sudah baik, ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran yang rata-rata lebih dari 0.9 (deviasi realisasi anggaran < 10%). Pertumbuhan anggaran pada program utama terus meningkat dari tahun ke tahun menyesuaikan dengan tuntutan untuk pencapaian target kinerja yang semakin meningkat, sedangkan program pendukung disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pelayanan internal SKPD.



Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 rata-rata Belanja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dialokasikan untuk Belanja Pegawai lebih kecil daripada belanja barang dan jasa yakni pada tahun 2013 sebesar 550 juta

rupiah sampai dengan tahun 2016 meningkat menjadi 833 juta rupiah. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa atau belanja publik awalnya pada tahun 2013 sebesar 1,841 milyar rupiah, meningkat signifikan menjadi 3,484 milyar rupiah pada tahun 2016. Sedangkan pada belanja modal jumlahnya sangat kecil pada tahun 2013 saja hanya sebesar 32 juta rupiah, pada tahun 2016 belanja modalnya sebesar 232 juta rupiah.

5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

Tujuan utama pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo adalah bagaimana mencukupi kebutuhan pangan sampai tingkat individu dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini juga sangat berpengaruh pada ketahanan pangan suatu wilayah, sebab sektor pertanian merupakan *Resource Based* dalam penyediaan pangan bagi masyarakatnya. Dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di

Provinsi Gorontalo, yang perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan ke depan sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud di masa mendatang.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo adalah :

1. Kebijakan pengembangan pangan yang terfokus pada beras
2. Upaya penggalan dan pemanfaatan sumber-sumber pangan karbohidrat lokal belum optimal
3. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam :
 - Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras
 - Masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian serta sayur dan buah.
4. Kemampuan memproduksi pangan lokal masih rendah, terutama musim paceklik
5. Penerapan teknologi produksi dan teknologi pengolahan pangan lokal di masyarakat belum mampu mengimbangi pangan olahan asal impor yang membanjiri pasar
6. Kurangnya pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
7. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
8. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya.
9. Terbatasnya tenaga/sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas
10. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
11. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
12. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya Kelompok Afinitas dalam pengembalian dana Bansos guna meningkatkan perekonomian

dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa (LKD).

13. Belum tersedianya data potensi daerah yang terintegrasi
14. Sektor pertanian merupakan program unggulan

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo adalah :

1. Tersedianya anggaran dari APBD maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan ketahanan pangan.
2. Adanya koordinasi dengan Badan POM, dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ketahanan Pangan daerah dan MUI melakukan berbagai upaya agar terdapat standar pangan yang sehat serta halal.
3. Pekarangan masyarakat yang tersedia untuk dilaksanakan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan.
4. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog, LDPM dan Kelompok Lumbung Masyarakat.
5. Terbentuknya Kelompok Afinitas pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
6. Adanya kebijakan Nasional percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
7. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang akan bentuk Badan Urusan Pangan Nasional yang dibawah langsung oleh Presiden.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang berkaitan dengan pelayanan di bidang ketahanan pangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi yang memudahkan akses distribusi produksi pangan menyebabkan biaya distribusi pangan menjadi tinggi.
2. Belum adanya gedungcadangan pangan pemerintah daerah sebagai penyangga pangan jika terjadi krisis pangan.
3. Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar keagamaan nasional.
4. Kurangnya data ekspor impor (keluar masuk) pangan antar wilayah maupun antar pulausehingga sangat menghambat dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.
5. Menurunnya akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas, menyebabkan terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien dan kasus gizi kurang/buruk di wilayah tertentu.
6. Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat desa miskin belum maksimal.
7. Belum tercapainya skor konsumsi, ketersediaan, mutu, keragaman pangan dan keseimbangan gizi sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal.
8. Masih kurangnya pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal terutama konsumsi karbohidrat, gula, lemak, dan garam yang kurang/berlebihan menyebabkan *malagizi* ditandai dengan munculnya berbagai risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi

kolesterol dan penyakit jantung.

9. Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan terhadap salah satu sumber karbohidrat yakni beras sebagai makanan pokok.
10. Masih terjadinya kecenderungan konsumsi pada produk impor seperti terigu serta menurunnya konsumsi pangan lokal.
11. Masih besarnya ketergantungan penyediaan pangan khususnya buah, sayuran dan kacang-kacangan asal luar daerah.
12. Masih banyaknya pangan segar yang belum terjamin mutu dan keamanannya yang beredar di masyarakat.

Identifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2017-2022 berdasarkan tupoksi di susun ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ketersediaan	Ketersediaan pangan untuk energi dan protein selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi	NBM	Tersedianya Alokasi untuk peningkatan produksi pangan lokal	kebutuhan pangan terus meningkat meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian anomali iklim, bencana alam dan menurunnya kualitas lingkungan	untuk memenuhi ketersediaan energi 2400 kkal dan protein 57 gr/kapita/hari masih tergantung pada bahan pangan pokok beras dan pangan impor/luar daerah lemahnya koordinasi lintas sektor
Kerawanan Pangan	Tingginya Prosentase Penduduk Rawan Pangan	Pendataan & BPS	Pemetaan Daerah Rawan Pangan	rendahnya daya beli masyarakat tingginya pangsa	belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

				pengeluaran untuk produk pangan	
Distribusi Harga Pangan	distribusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan mahalannya harga pangan		Sistem/rantai pasar pangan yang belum efektif	terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan	rendahnya kemampuan/daya beli masyarakat dalam mengakses pangan lemahnya koordinasi lintas sektor
	Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen dengan coefficient variant (cv) < 10%	Operasi Pasar	terbatasnya pengumpulan data informasi pasar	fluktuasi harga	Harga pangan masih fluktuatif
Konsumsi dan Keamanan Pangan	kualitas konsumsi masyarakat masih rendah, skor PPH 79.4	widyakarya nasional pangan dan gizi (WNPG)	belum optimalnya diversifikasi pangan lemahnya promosi dan pelatihan olahan produk pangan lokal Terbatasnya produksi pangan lokal	terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang bergizi berimbang aman dan halal budaya masyarakat belum makan bila tidak makan nasi regulasi penggunaan produk pangan lokal untuk pangan olahan	Penganekaragaman pangan masyarakat belum optimal

Berdasarkan dari aspek kajian terbagi atas ketersediaan pangan,

kerawanan pangan distribusi harga pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan. Dimana dalam undang-undang ditegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman bermutu dan bergizi, seimbang baik pada tingkat nasional maupun daerah perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Dari kondisi saat ini, Ketersediaan pangan untuk energi dan protein selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sedangkan untuk distribusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan mahal nya harga pangan dan Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen dengan coefficient variant (cv) < 10%. Untuk kualitas konsumsi, konsumsi masyarakat Gorontalo masih rendah, dimana capaian skor PPH 79.4 yang masih jauh dari skor PPH ideal.

Guna mengidentifikasi permasalahan dalam pemenuhan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, capaian skor PPH, tingkat konsumsi serta keamanan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM), pendataan dan dan BPS, operasi pasar, dan Widyakarya nasional pangan dan gizi (WNPG).

Faktor internal yang berpengaruh adalah tersedianya Alokasi untuk peningkatan produksi pangan lokal, pemetaan daerah rawan pangan, Sistem/rantai pasar pangan yang belum efektif, terbatasnya pengumpulan data informasi pasar, belum optimalnya diversifikasi pangan, lemahnya promosi dan pelatihan olahan produk pangan lokal, dan terbatasnya produksi pangan lokal.

Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh adalah kebutuhan pangan terus meningkat, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, anomali iklim, bencana alam dan menurunnya kualitas lingkungan. Selanjutnya rendahnya daya beli masyarakat, tingginya pangsa pengeluaran untuk produk pangan, terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil.

Faktor eksternal lainnya adalah berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan, fluktuasi harga, terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang bergizi berimbang aman dan halal, budaya masyarakat belum makan bila tidak makan nasi serta regulasi penggunaan produk pangan lokal untuk

pangan olahan.

Untuk permasalahan pelayanan SKPD Dinas Pangan yaitu untuk memenuhi ketersediaan energi 2400 kkal dan protein 57 gr/kapita/hari masih tergantung pada bahan pangan pokok beras dan pangan impor/luar daerah, masih lemahnya koordinasi lintas sektor stakeholder terkait, belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Selain itu rendahnya kemampuan/daya beli masyarakat dalam mengakses pangan, harga pangan masih fluktuatif, dan penganekaragaman pangan masyarakat belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017-2012

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Provinsi Gorontalo pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2012, maka untuk Lima Tahun kedepan telah disusun Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT GORONTALO YANG UNGGUL, MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi 2017 – 2022 mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu :

1. GORONTALO MAJU DAN UNGGUL

Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sector pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

2. GORONTALO SEJAHTERA

1. **Kondisi daerah yang sejahtera**, ditandai dengan meingkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), peningkatan ekonomi, peningkatan produk domestic regional bruto (PDRB) perkapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.
2. **Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government)** dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan

pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat opini pengelolaan keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui 5 (Lima) Misi Pembangunan yaitu :

1. **Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.** Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan pangan dan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. **Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah.** Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastuktur di perkotaan dan perdesaan.
3. **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil.** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bias terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
4. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.** Peningkatan kualitas lmtak, Pendidikan, Kesehatan, dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumber daya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religious serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
5. **Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani.** Menciptakan aparatur pemerintahan yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

Sesuai penjelasan visi dan misi tersebut di atas maka Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung misi ke-1 (satu) yaitu mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, diorientasikan pada

pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan pangan dan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.

Tabel3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Dinas Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo

Visi :				
" TERWUJUDNYA MASYARAKAT GORONTALO YANG UNGGUL, MAJU DAN SEJAHTERA"				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak stabilnya harga pangan di tingkat petani 2. Tingginya Penduduk Rawan Pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan
	Program : Program Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman 	<ol style="list-style-type: none"> 2. tingginya presentase penduduk miskin dengan kemampuan daya beli yang rendah 3. Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal 	<ol style="list-style-type: none"> 2. adanya Program-program dalam pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan 3. tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal

Untuk permasalahan pelayanan terkait dengan tidak stabilnya harga pangan di tingkat petani dimana harganya sangat berfluktuatif, harga anjlok pada saat panen raya dan sangat mahal pada musim paceklik, faktor penghambatnya adalah harga pembelian pemerintah hanya pada komoditas tertentu saja seperti beras dan jagung. Sedangkan komoditas lain seperti cabe dan bawang belum ada regulasi yang mengaturnya. Dengan adanya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan sebagai faktor pendorong diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani di sektor usaha ekonomi produktif pedesaan.

Permasalahan tingginya penduduk rawan pangan, faktor penghambatnya adalah masih tingginya presentase penduduk miskin yang dengan kemampuan daya beli yang masih rendah. Dengan adanya program dalam pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terutama penduduk miskin yang merupakan faktor pendorong.

Permasalahan lain adalah Rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman, faktor penghambatnya adalah konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta halal. Sehingga perlu didukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat. Dengan faktor pendorong tersedianya penganekaragaman pangan lokal diharapkan B2SA dapat segera terwujud.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD

Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, faktor penghambat pelayanan SKPD antara lain adalah : 1) harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu; 2) tingginya presentase penduduk miskin yang dengan kemampuan daya beli yang masih rendah; 3) rendahnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman. Dan faktor pendorong adalah : 1) sudah adanya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan; 2) adanya program dalam pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan; dan 3) tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dengan dengan sasaran strategis jangka menengah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam,
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan,
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen,
4. Meningkatnya keragaman konsumsi yang sehat dan aman
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, maka target kinerja program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI tahun 2015-2019 antara lain :

1. Tersedianya pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
3. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) diatas atau sama dengan HPP;
4. Stabilitasnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan *Coefficient of Varians* maksimum 5%;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019;
6. Meningkatnya konsumsi energi dan protein masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG) untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
7. Tercapainya keamanan pangan segar dengan jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi sebanyak 400 orang pada tahun 2019.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang beragam	masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan	adanya program peningkatan produksi pangan
2	menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	masih tingginya presentase penduduk rawan pangan	belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan	adanya basis data terpadu kemiskinan dari TNP2K
3	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	harga bahan pangan masih berfluktuatif	Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	adanya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan
4	meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman	masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal	tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal
5	meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)	masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat
6	Tercapainya keamanan pangan	Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius	Kinerja petugas belum optimal	pelatihan yang terintegrasi

Berdasarkan hasil telaah terhadap Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran Renstra jangka menengah K/L yaitu:

1. masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal
2. masih tingginya presentase penduduk rawan pangan
3. harga bahan pangan masih berfluktuatif
4. masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman
5. masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal
6. Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius

Terkait dengan permasalahan tersebut, faktor-faktor pendorong dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI adalah : 1) lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan; 2) belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan; 3) Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu; 4) Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal; 5) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan; 6) Kinerja petugas belum optimal dan faktor penghambat adalah : 1) adanya program peningkatan produksi pangan; 2) adanya basis data terpadu kemiskinan dari TNP2K; 3) adanya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan; 4) tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal; 5) adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat; dan 6) pelatihan yang terintegrasi.

3.4 Telaahan Rencanan Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD Dinas Pangan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang	masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan	adanya program peningkatan produksi pangan
2	Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah Rawan Bencana Alam	masih tingginya presentase penduduk rawan pangan	belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan	adanya basis data terpadu kemiskinan dari TNP2K
3	belum optimalnya kawasan strategis	harga bahan pangan masih berfluktuatif	Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	danya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan
4	Pertumbuhan Penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang	masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal	tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal
5	Keterbatasan infrastruktur wilayah	masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat
		Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius	Kinerja petugas belum optimal	pelatihan yang terintegrasi

Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD Dinas Pangan ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari : 1) Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang; 2) Kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah Rawan Bencana Alam; 3) belum optimalnya kawasan strategis; 4) Pertumbuhan Penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang; dan 5) Keterbatasan infrastruktur wilayah.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang secara tidak langsung akan berpengaruh pada rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal. Pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman karena pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan produksi pangan.

Implikasi RTRW tentang kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah rawan bencana alam, memberikan ancaman terkait belum optimalnya kawasan strategis dan keterbatasan infrastruktur wilayah yang secara tidak langsung juga berhubungan dengan permasalahan pelayanan SKPD Dinas Pangan yaitu : harga bahan pangan masih berfluktuatif, kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal dan keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius.

Begitu pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan konversi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang	masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan	adanya program peningkatan produksi pangan
2	Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan bencana alam dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi rawan pangan	masih tingginya presentase penduduk rawan pangan	belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan	adanya basis data terpadu kemiskinan dari TNP2K
3	Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan pedesaan	harga bahan pangan masih berfluktuatif	Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	danya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan
4	Perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan antara produksi pangan dan penduduk	masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal	tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal
5	Keterbatasan infrastruktur wilayah	masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat
		Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius	Kinerja petugas belum optimal	pelatihan yang terintegrasi

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan SKPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstras SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHAS bagi pelayanan SKPD.

Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.6 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain (dunia usaha, akademik, sosia budaya, penemuan teknologi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gejolak Perekonomian Global	Semakin Besarnya Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditas, situasi pangan nasional	Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	Lingkungan Hidup	lingkungan hidup, perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan	Lingkungan Hidup	
3	Sustainable Development Goals (SDG's)	Kemiskinan dan Gender	Kemiskinan	
4	Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan	Kerjasama antar provinsi	Kerjasama antar daerah	

Dari hasil identifikasi isu-isu strategis dari lingkungan eksternal Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, dilakukan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

- b. Dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ketahanan Pangan dan Pertanian	25	25	20	15	15	100
2	Lingkungan Hidup	20	20	20	20	20	100
3	Kemiskinan	25	20	25	15	15	100
4	Kerjasama antar daerah	25	25	20	15	15	100
Jumlah		95	90	85	65	65	100

- c. Selanjutnya dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dan disusun suai dengan peringkat tertinggi, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketahanan Pangan dan Pertanian	100	20
2	Lingkungan Hidup	10	2
3	Kemiskinan	90	18
4	Kerjasama Antar Daerah	30	6
5	Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditas pangan semakin besar	40	7
6	Situasi Pangan Nasional	60	12
7	Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan	45	9
8	Gender	5	1
9	kerjasama antar provinsi	20	4
10	Sustainable Development Goals (SDG's)	50	10
11	Gejolak Perekonomian Global	15	3
12	Ancaman global terhadap krisis pangan	35	8
Jumlah		500	100

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan : Terwujudnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat

Sasaran :

Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat dengan indikatornya adalah pemenuhan pangan di daerah rawan pangan dengan jumlah sebanyak 27 daerah pada akhir periode renstra.

2. Tujuan : Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok

Sasaran :

Penyediaan pangan dengan harga terjangkau dengan indikatornya adalah terjaganya stabilitas harga pangan pokok yakni harga beras dan jagung di tingkat petani minimal sama dengan harga pembelian pemerintah, dan terjaganya stabilitas harga komoditas pangan pokok (beras, cabe, bawang merah, gula pasir, dan minyak goreng) tingkat konsumen dengan coefisient variant masing-masing untuk beras di bawah 5 persen, cabe dan bawang merah di bawah 25 persen, gula pasir dan minyak goreng di bawah 10 persen.

3. Tujuan : Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal

Sasaran :

Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dengan indikatornya adalah tersedianya sumber pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga pada daerah rawan pangan sebanyak 27 daerah rawan pangan pada akhir periode renstra.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat	Pemenuhan Pangan di Daerah Rawan Pangan (27 DRP)	5 daerah rawan pangan	10 daerah rawan pangan	15 daerah rawan pangan	21 daerah rawan pangan	27 daerah rawan pangan
Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok	Penyediaan pangan dengan harga terjangkau	Harga pangan pokok (beras dan jagung) di tingkat produsen	Beras \geq HPP Jagung \geq HRP				
		Harga Pangan pokok (beras, cabe, bawang merah, gula pasir, dan minyak goreng) di tingkat konsumen	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)
Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	Peningkatan Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal	Sumber pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga pada daerah rawan pangan	5 daerah rawan pangan	10 daerah rawan pangan	15 daerah rawan pangan	21 daerah rawan pangan	27 daerah rawan pangan

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo 2018-2022.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan.

1. *Terwujudnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat*

Strategi :

- memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan
- memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam gizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal
- melakukan analisis dan program aksipenanganan wilayah rawan pangan

Kebijakan :

- Mengembangkan kajian responsif dan antisipatif ketersediaan pangan
- Pembinaan dan Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan
- Deteksi dini terhadap wilayah rawan pangan
- Intervensi wilayah rawan pangan

2. *Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok*

Strategi :

- Penguatan sistem kelembagaan pangan
- Melakukan stabilisasi harga pangan pokok

Kebijakan :

- PenguatandanPengembanganlembagadistribusipanganmasyarakat
- Penguatandanpengembangancadanganpanganmasyarakatdanpemerintah
- Pengembanganusahapanganmasyarakat/TokoTani Indonesia
- Pemantauan panel hargadanpasokansertajaringandistribusipangan
- IntervensiSubsidipanganpokok
- PeningkatanperanSatgasPanganTerpadu

3. *Meningkatnyakonsumsipangan yang beragam, bergizi, seimbangdanamanberbasissumberdayalokal*

Strategi :

- Meningkatkanpenganekaragamankonsumsipanganberagam, bergizi, seimbangdanaman
- Memantapkanpengawasankeamananpangansegar

Kebijakan :

- Peningkatanpenganekaragamankonsumsipanganberbasissumberdayapanganlokal
- Pengembanganteknologipengolahanpanganterutamapanganlokal non berasdan non terigu
- Peningkatanjumlahinformasiinovasiteknologimelalui media cetakdanelektronik
- Peningkatanpengawasankeamananpangansegar

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		KEBIJAKAN	
Terwujudnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdayalokal dan akses pangan masyarakat	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdayalokal dan akses pangan masyarakat	1	Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan	1	Pengembangan kajian responsif dan partisipatif ketersediaan pangan
		2	memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam gizi seimbang dan aman berbasis sumberdayalokal	2	Pembinaan dan Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan
		3	melakukan analisis dan program aksi penanganan wilayah rawan pangan	1	Deteksi dini terhadap wilayah rawan pangan
				2	Intervensi wilayah rawan pangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		KEBIJAKAN	
Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok	Penyediaan pangan dengan harga terjangkau	1	Penguatan sistem kelembagaan pangan	1	Penguatan dan Pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat
		2	Melakukan stabilisasi harga pangan pokok	1	Penguatan dan pengembangan pangan masyarakat dan pemerintah
				2	Pengembangan usaha pangan masyarakat/Toko Tani Indonesia
				3	Pemantauan panel harga dan pasokan sertajaring distribusi pangan
4	Intervensi Subsidi pangan pokok				
5	Peningkatan peran Satgas Pangan Terpadu				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnyako nsumsipangan yang beragam, bergizi, seimbangdanam anberbasissumb erdayalokal	PeningkatanPola konsumsipangan masyarakat yang beragambergizi, seimbangdanam anberbasissumb rdayalokal	Meningkatkanpengane karagamankonsumsipa nganberagam, bergizi, seimbangdanaman	1 Peningkatanpenganekaragama nkonsumsipanganberbasissumb erdayapanganlokal
			2 Pengembanganteknologipengol ahanpanganterutamapanganlo kal non berasdan non terigu
			3 Peningkatanjumlahinformasiino vasiteknologimelalui media cetakdanelektronik
		Memantapkanpengaw asankeamananpangans egar	1 Peningkatanpengawasankeama nanpangansegar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikator yang mengikuti ketentuan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana.

Untuk Program dan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Analisis Data Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Prognosa HBKN, NBM, PPH&AKG, Pola Panen Bulanan, SKPG, FSVA dan Akses Pangan)
 - Kios akses pangan masyarakat
 - Penanganan daerah rawan pangan

2. Program Pengembangan Distribusi, Pemantauan dan Stabilisasi Harga serta penguatan Cadangan Pangan dengan kegiatannya adalah :
 - Penguatan kelembagaan pangan lokal (gapoktan/kelompok) dalam upaya stabilisasi harga ditingkat produsen.
 - Stabilisasi Harga Pangan ditingkat konsumen
 - Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
3. Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dengan kegiatannya adalah :
 - Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - Pengembangan Pangan Pokok Lokal dan Tradisional
 - Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH
 - pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
 - Pengujian dan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan (UPTD)
4. Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur dengan kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
 - Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan dengan kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - Perencanaan, Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan
 - Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun tabel 7.1 indikator kinerja sebagaimana Terlampir

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menjadi pedoman penyusunan Renja-Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dan RKA/DPA tahun pertama; menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Renja-SKPD setelah Renstra-SKPD berakhir.

Renja-SKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra-SKPD pada periode berikutnya.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Penjabaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo lebih lanjut dalam bentuk Renja-SKPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo. Kepala Dinas Pangan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra SKPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo selanjutnya Kepala Dinas Pangan bersama BAPPEDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra-SKPD Dinas pangan Provinsi Gorontalo. Keterlibatan *stakeholder* pembangunan dalam pelaksanaan Renstra-SKPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022.